



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 19339-19348

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pembangunan Desa

Imam Baidlowi

Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo

imam_baidlowi@dosen.umaha.com

Abstract

Village development is a strategic priority in Indonesia because it supports equitable regional growth and improves community welfare. This study investigates the effects of the Village Fund and Village Fund Allocation on village development performance in Gedeg District, Mojokerto Regency. A quantitative design was used with secondary data collected from the Village Revenue and Expenditure Budget, budget realization reports, and other official government documents. The population included all villages in Gedeg District, so a census sampling technique was applied. The data were analyzed using multiple linear regression after meeting the classical assumption tests of normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. The results indicate that both the Village Fund and Village Fund Allocation have positive and significant effects on village development performance. The adjusted R^2 value of 0.573 shows that 57.3% of the variation in development performance is explained by these two fiscal variables, while the remaining 42.7% is influenced by other factors not examined in this study. These findings confirm that fiscal transfers contribute substantially to strengthening village development outcomes. Therefore, village governments should optimize the use of these funds through participatory planning, transparent implementation, and accountable financial management to ensure more effective and sustainable development. Future research should examine governance quality, human resources, and local economic conditions to capture other determinants of village development performance more comprehensively in Indonesia.

Keywords: Village Fund; Village Fund Allocation; Village Development Performance

1. Introduction

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa [1]. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Kedua sumber pendanaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal desa sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan [2] [3].

Secara teoritis, desentralisasi fiskal diyakini dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah lokal lebih memahami kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat [4]. Dalam konteks negara berkembang, desentralisasi juga dipandang sebagai mekanisme untuk memperbaiki responsivitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan wilayah melalui pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat [5] [6]. Namun demikian, manfaat tersebut sangat bergantung pada kapasitas institusi lokal, kualitas tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran [7] [8].

Dana Desa diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan ADD berfungsi mendukung operasional pemerintahan desa serta pembiayaan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal [1] [3]. Dalam penelitian ini, kinerja pembangunan desa dipahami sebagai capaian pembangunan fisik, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat yang mencerminkan efektivitas penggunaan dana desa. Meskipun transfer fiskal ke desa menjadi instrumen penting dalam pembangunan dari bawah, capaian pembangunan antardesa masih menunjukkan variasi. Sebagian desa mampu memanfaatkan dana tersebut secara optimal, tetapi sebagian lainnya masih menghadapi

kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur, perencanaan yang belum optimal, dan efektivitas pengelolaan keuangan yang belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja pembangunan desa [9] [8].

Literatur empiris mengenai desentralisasi fiskal juga menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Sejumlah studi menegaskan bahwa transfer fiskal dapat mendorong pembangunan lokal apabila didukung oleh kelembagaan yang kuat dan mekanisme pengawasan yang memadai, tetapi dampaknya dapat melemah ketika kapasitas pemerintah lokal rendah atau prioritas belanja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat [7] [6] [9]. Masih terdapat ruang penelitian untuk menguji secara lebih spesifik bagaimana Dana Desa dan ADD memengaruhi kinerja pembangunan pada level desa.

Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, merupakan wilayah yang secara konsisten menerima dana desa dan ADD setiap tahun. Setiap desa memiliki karakteristik, kebutuhan pembangunan, dan kapasitas pengelolaan anggaran yang berbeda sehingga memungkinkan terjadinya variasi dalam kinerja pembangunan desa. Kecamatan Gedeg menjadi lokasi yang relevan untuk menganalisis sejauh mana dana desa dan ADD berkontribusi terhadap kinerja pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai efektivitas kebijakan fiskal desa serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa agar pembangunan berlangsung lebih efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan dan sumber daya fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan meningkatkan efisiensi penyediaan pelayanan publik, karena pemerintah lokal dinilai memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat [4] [10]. Dalam perspektif ini, transfer fiskal memungkinkan pemerintah pada tingkat lokal menyusun prioritas pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah sehingga alokasi anggaran menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tingkat desa, implementasi desentralisasi fiskal diwujudkan melalui penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Kedua sumber pendanaan tersebut memberikan ruang fiskal bagi pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Efektivitas pengelolaan transfer fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa [4] [1] [2].

Teori Pembangunan

Teori pembangunan menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia [11]. Dalam konteks pembangunan wilayah, desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karena desa menjadi basis aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan pembangunan tercermin dari meningkatnya kualitas infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Pemanfaatan Dana Desa dan ADD diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Pengalokasian Dana Desa bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Besarnya Dana Desa yang diterima setiap desa diharapkan mampu

meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah desa sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat [1] [2].

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. ADD dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa, membiayai pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, ADD memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan yang tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui Dana Desa. Dengan demikian, ADD menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal desa dan meningkatkan efektivitas pembangunan desa [1] [2].

Kinerja Pembangunan Desa

Kinerja pembangunan desa merupakan tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja tersebut dapat tercermin melalui capaian pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien [12]. Dalam penelitian ini, kinerja pembangunan desa diukur menggunakan indikator yang tersedia dalam data sekunder sesuai dengan unit analisis penelitian.

Pengaruh Dana Desa terhadap Kinerja Pembangunan Desa

Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan anggaran bagi pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik. Secara teoritis, semakin besar Dana Desa yang diterima dan semakin efektif pengelolaannya, semakin besar pula peluang pemerintah desa meningkatkan kualitas pembangunan. Hal ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya kewenangan fiskal di tingkat lokal agar pemerintah desa dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien sesuai kebutuhan masyarakat [4] [10]. Selain itu, Dana Desa juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa dana tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pembangunan desa.

H1: Dana Desa berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan desa.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pembangunan Desa

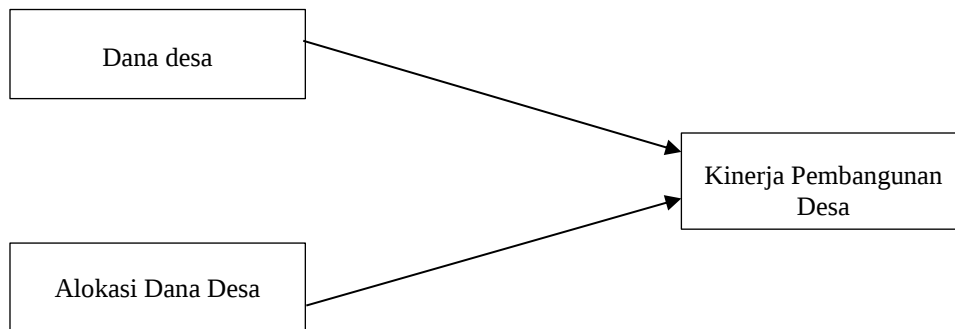
Selain Dana Desa, ADD merupakan sumber pembiayaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan. Pemanfaatan ADD secara efektif memungkinkan pemerintah desa meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan mendukung berbagai program pembangunan. Dalam perspektif pembangunan, ketersediaan ADD memperbesar kemampuan desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lebih optimal. Secara normatif, ADD juga merupakan bagian penting dari struktur pendanaan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, pemerintah desa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merealisasikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ADD diperkirakan berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan desa.

H2: Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan desa.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai variabel independen, sedangkan kinerja pembangunan desa sebagai variabel dependen. Secara konseptual, Dana Desa dan ADD merupakan instrumen desentralisasi fiskal yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pembangunan pemerintah desa (Oates,

1972; Musgrave, 1959). Semakin besar dan semakin efektif pemanfaatan kedua sumber pendanaan tersebut, maka semakin baik pula kinerja pembangunan desa yang dihasilkan.



Gambar 1 Desain Penelitian

2. Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif-kausal karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan sebab-akibat antara Dana Desa dan ADD terhadap kinerja pembangunan desa [13]. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang dianalisis berbentuk angka yang memungkinkan pengujian hipotesis secara statistik. Lokasi atau populasi penelitian: seluruh desa Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang menjadi objek penelitian (sesuai cakupan penelitian). Teknik pengambilan sampel dapat menggunakan: Sampling jenuh (sensus). Data kuantitatif, berupa angka, persentase, atau skor indeks [14].

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen, yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta satu variabel dependen, yaitu Kinerja Pembangunan Desa. Seluruh variabel diukur menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Realisasi APBDes, serta dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur akuntansi sektor publik [2], [3], [12].

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber Data
Dana Desa (X₁)	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014).	Total Dana Desa yang diterima setiap desa dalam satu tahun anggaran.	Rasio (Rp) atau Ln Dana Desa	APBDes, Laporan Realisasi APBDes
Alokasi Dana Desa (X₂)	Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa	Total ADD yang diterima setiap desa dalam satu tahun anggaran.	Rasio (Rp) atau Ln ADD	APBDes, Laporan Realisasi APBDes

	dan pelaksanaan pembangunan desa (Kementerian Dalam Negeri, 2018).			
Kinerja Pembangunan Desa (Y)	Kinerja pembangunan desa merupakan tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan yang direncanakan melalui pemanfaatan anggaran pembangunan desa. Dalam konteks penelitian ini, kinerja diukur berdasarkan capaian realisasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan desa (Mardiasmo, 2009; Kementerian Dalam Negeri, 2018).	Nilai realisasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa atau persentase realisasi belanja pembangunan terhadap anggaran yang ditetapkan.	Rasio (%) atau Rasio (Rp)	Laporan Realisasi APBDes

3. Results and Discussions

Hasil uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Test Statistic sebesar 0,147 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,095. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,095 > 0,05$) sehingga disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Model regresi telah memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil uji multikolinearitas Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel Dana Desa memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,062, sedangkan variabel Alokasi Dana Desa memiliki nilai VIF sebesar 1,012. Kedua nilai VIF tersebut berada di bawah batas maksimum 10, bahkan jauh di bawah kriteria yang lebih ketat yaitu 5. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi memenuhi asumsi multikolinearitas sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Variabel	Variance Influence Factor	Kriteria Standar	Kesimpulan
Dana desa	1,062	VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinearitas
Alokasi dana desa	1,012	VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2026

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Spearman's rho. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,112, sedangkan variabel Alokasi Dana Desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,125. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen dengan residual absolut, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Unstandardized Residual Sig.	Keterangan
Dana desa	0,112	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Alokasi dana desa	0,125	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2026

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson (DW) untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,713. Berdasarkan tabel Durbin-Watson pada taraf signifikansi 5%, nilai Durbin-Watson berada di antara nilai batas atas (d_U) dan $4 - d_U$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Oleh karena itu, model regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai adjusted r square sebesar 0,573. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 57,3% variasi kinerja pembangunan desa dapat dijelaskan oleh variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Sementara itu, 42,7% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti kapasitas aparatur desa, kualitas perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi kinerja pembangunan desa. Uji kelayakan model melalui uji F sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga disimpulkan model yang diformulasikan dalam persamaan regresi sudah tepat.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dengan melihat nilai signifikansi untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil pengujian pengujian masing-masing variabel sebagai berikut.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Regresi

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien	Nilai ρ	Keterangan
Dana desa → Kinerja pembangunan desa	0,583	0,010*)	Berpengaruh positif dan signifikan
Alokasi dana desa → Kinerja pembangunan desa	0,682	0,023*)	Berpengaruh positif dan signifikan

*) signifikansi secara statistik pada level ρ sebesar 5%

Sumber: Data diolah, 2026

Pengujian hipotesis 1 menunjukkan Dana Desa memiliki koefisien regresi sebesar 0,583 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,010 < 0,05$), sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan desa. Pengujian hipotesis 2 menunjukkan Alokasi Dana Desa memiliki koefisien regresi sebesar 0,682 dengan nilai signifikansi sebesar 0,023. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,023 < 0,05$), sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan desa.

Pembahasan

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kinerja Pembangunan Desa

Hasil penelitian ini mendukung teori desentralisasi fiskal bahwa pelimpahan kewenangan dan sumber daya fiskal kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa akan meningkatkan efisiensi penyediaan pelayanan publik karena pemerintah lokal lebih memahami kebutuhan masyarakat [4]. Melalui Dana Desa, pemerintah desa memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pemberdayaan masyarakat, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Semakin besar dana desa yang diterima dan semakin baik pengelolaan maka semakin baik pula kinerja pembangunan desa yang dihasilkan [4]. Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pelaksanaan pembangunan di desa. Ketersediaan anggaran memungkinkan pemerintah desa merealisasikan berbagai program pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa. Pembangunan jalan desa, saluran irigasi, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, serta infrastruktur pendukung lainnya memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi desa [15].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa apabila dikelola secara efektif. Studi [16] menemukan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa karena meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan serta mendukung peningkatan kualitas pembangunan pada tingkat desa. Selain itu, [17] bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Temuan penelitian ini juga didukung oleh [18] yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan desa. Pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam konteks Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, pengaruh positif Dana Desa menunjukkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Semakin besar Dana Desa yang diterima, semakin besar pula kemampuan pemerintah desa dalam membiayai program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, besarnya Dana Desa perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang akuntabel, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan [17] [18]. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Dana Desa merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan desa. Pemerintah desa perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang transparan, serta evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara lebih efektif [16] [18].

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kinerja Pembangunan Desa

Secara teoritis, temuan ini mendukung teori desentralisasi fiskal. Teori tersebut menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa akan meningkatkan efisiensi penyediaan pelayanan publik karena pemerintah lokal lebih memahami kebutuhan masyarakat [4]. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi fiskal yang memberikan dukungan pendanaan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, meningkatkan kapasitas aparatur desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, semakin optimal pemanfaatan ADD, semakin besar pula kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan secara efektif [4].

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga berkontribusi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketersediaan ADD memungkinkan pemerintah desa meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi pelaksanaan program, serta menyediakan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kinerja pembangunan desa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [19] yang menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang didukung oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan ADD sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam mengelola anggaran pembangunan [19]. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian [20] mengenai pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Penelitian tersebut menemukan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun, yang menunjukkan bahwa ADD berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan desa apabila dikelola secara efektif [20]. Selain itu, penelitian [21] mengenai pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap belanja bidang pembangunan desa menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berkontribusi dalam meningkatkan belanja pembangunan desa. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ADD yang diterima desa, semakin besar pula kemampuan pemerintah desa dalam membiayai program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat [21].

Dalam konteks Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, pengaruh positif Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten telah dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus memperlancar pelaksanaan pembangunan. Dukungan pendanaan tersebut

memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta merealisasikan berbagai program pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan desa [4][19].

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya pemerintah desa terus meningkatkan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan anggaran yang transparan, pengawasan yang akuntabel, serta evaluasi program pembangunan secara berkelanjutan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa agar pemanfaatan ADD semakin tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat [20] [21].

4. Conclusion

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kinerja pembangunan desa di Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan desa. Peningkatan dana desa mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan, penyediaan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pembangunan desa. Alokasi dana desa juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi dana desa berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Pengelolaan alokasi dana desa yang efektif dan akuntabel mampu meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa merupakan instrumen fiskal yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan desa di Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Optimalisasi pengelolaan kedua sumber pendanaan tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa di Kecamatan Gedeg diharapkan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa serta alokasi dana desa agar pemanfaatan anggaran semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa dan alokasi dana desa secara optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan desa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja pembangunan desa, seperti kapasitas aparatur desa, tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, maupun karakteristik sosial ekonomi desa. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan wilayah penelitian atau menggunakan data panel dalam beberapa periode agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih baik.

Reference

- [1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," 2014
- [2] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," 2014
- [3] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," 2018
- [4] W. E. Oates, *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- [5] D. A. Rondinelli, J. R. Nellis, and G. S. Cheema, "Decentralization in developing countries: A review of recent experience. World Bank Staff Working Papers No. 581.," World Bank, 1983.
- [6] J.-P. Faguet, "Decentralization and Governance," *World Dev.*, vol. 53, pp. 2–13, 2014.
- [7] P. Bardhan and D. Mookherjee, *Decentralization and Local Governance in Developing Countries: A comparative Perspective*. MIT Press, 2006.
- [8] Martinez-Vazquez, S. J., Lago-Peñas, and A. Sacchi, "The Impact of Fiscal Decentralization: A Survey," *J. Econ. Surv.*, vol. 31, no. 4, pp. 1095–1129, 2017.
- [9] P. Smoke, "Rethinking Decentralization: Assessing Challenges to a Popular Public Sector Reform," *Public Adm. Dev.*, vol. 35, no. 2, pp. 97–112, 2015.
- [10] R. A. Musgrave, *The theory of Public Finance*. New York, NY: McGraw-Hill, 1959.
- [11] M. P. Todaro and S. C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. Pearson Education: New York, 2015.
- [12] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- [13] S. Bahri, *Metodologi Penelitian Bisnis - Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*, 2nd ed. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2025.
- [14] I. Baidlowi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 1st ed. Diva Pustaka, Purbalingga, 2025.

- [15] N. Andris, Z. Boku, and R. S. Badu, "Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa," *Jambura Account. Rivew*, vol. 6, no. 1, pp. 300–310, 2025.
- [16] R. T. Hidayat and Y. Hadiwibowo, "Pembangunan Desa Berkesinambungan: Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Desa. PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.," *PARETO J. Ekon. dan Kebijak. Publik*, vol. 6, no. 2, 2023.
- [17] H. Sakdiyah, I. L. Mariatun, and Z. Arief, "Efektivitas Penggunaa Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bilaporah Tahun 2021," *J. Pendidik. Ekon. Undiksha*, vol. 14, no. 1, pp. 190–193, 2022, doi: 10.23887/jjpe.v14i1.48427.
- [18] A. Agustian, R. Ridwan, and M. Z. B. Satrio, "Kinerja Pembangunan Desa: Analisis Manajemen Keuangan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Dana," *YUME J. Manag.*, vol. 8, no. 1, pp. 145–153, 2025.
- [19] R. Vanviora and W. P. Sari, "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa," *J. Educ. Hum. Soc. Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 351–359, 2023, doi: 10.34007/jehss.v6i1.1878.
- [20] A. Y. P. Parnomo and S. S. Utami, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Pada Tahun 2019-2023," *J. Ekon. Manaj. Dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 66–77, 2024.
- [21] R. P. Rahayu, D. N. Pratiwi, and I. L. Kusuma, "Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi, Pendapatan Asli Desa Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa," *Kurva J. Ekon. Manaj. Keuang. dan Bisnis*, vol. 1, no. 3, pp. 161–173, 2024, doi: 10.53088/kurva.v1i3.1088.

